

REPOSISI TREN ICT BIDANG KAJIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Edi Subkhan

Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Educational technology facing lots of problems of misunderstanding, over expectation and reductionism in Indonesia today. It is caused by the less paradigmatic comprehension of the educational technology scholars, so they are insist to build the educational technology as a discipline, not only as a field of studies. Secondly, the problems come from the reductionism of the educational technology into information and communication technology (ICT), it had been influenced by the ICT trend in education realm today. Thereby most of the people conceived that educational technology is the ICT itself. Based on those facts, educational technology needs to reorient itself by repositioning the ICT as a part of educational technology, not on the contrary. Then, it is important to re-assert that educational technology shouldn't follow the ICT market pragmatism, but to facilitate the social transformative actions trough improving the learning processes in educational practices.

Key words: educational technology, ICT, discipline, pragmatism, reposition.

ABSTRAK

Teknologi pendidikan menghadapi banyak masalah kesalahpahaman, ekspektasi yang berlebihan dan reduksionisme di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang paradigmatis dari para sarjana teknologi pendidikan, sehingga mereka bersikeras untuk membangun teknologi pendidikan sebagai sebuah mata pelajaran, tidak hanya sebagai bidang studi. Kedua, masalah datang dari reduksionisme teknologi pendidikan menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dimana telah dipengaruhi oleh tren TIK di dunia pendidikan saat ini. Dengan demikian sebagian besar orang memahami bahwa teknologi pendidikan adalah TIK itu sendiri. Berdasarkan fakta-fakta, teknologi pendidikan perlu reorientasi diri dengan reposisi TIK sebagai bagian dari teknologi pendidikan, bukan sebaliknya. Kemudian, penting untuk kembali menegaskan bahwa teknologi pendidikan tidak harus mengikuti pragmatisme pasar TIK, tetapi untuk memfasilitasi melalui tindakan sosial transformatif dengan meningkatkan proses pembelajaran dalam praktik pendidikan.

Kata Kunci: teknologi pendidikan, TIK, mata pelajaran, pragmatisme, reposisi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di kalangan mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) pada umumnya, dan terutama yang secara intens saya perhatikan secara khusus, yakni pada Program Studi TP di Universitas Negeri Semarang (Unnes), menggejala sebuah kegelisahan karena Fakultas Teknik mendirikan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun agaknya demikian pula, Fakultas Teknik membuka Jurusan Pendidikan TIK.¹ Lalu saya pikir apa hubungannya antara TP dan pendirian jurusan Pendidikan TIK? Bagi saya kegelisahan tersebut sebenarnya tidak berdasar ketika tata nilai pemahaman paradigmatis tentang TP dan TIK dapat dipahami dengan baik, dan juga diimplementasikan dengan tepat di lapangan.

Kegelisahan tersebut terjadi karena mahasiswa TP merasa khawatir terhadap peluang kerja mereka akan makin sempit ketika dibuka jurusan pendidikan TIK. Agaknya terdapat pemahaman bahwa jurusan pendidikan TIK nanti para lulusannya akan mengambil lahan pekerjaan yang selama ini menjadi wilayah dari lulusan TP. Sementara itu, pada internal TP sendiri, sampai sekarang masih mengalami “ketidakjelasan” pekerjaan dalam institusi pendidikan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) No. PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, yang agaknya menjadi secercah harapan bagi warga TP untuk turut dapat mengisi formasi guru TIK di sekolah-sekolah, ternyata juga sekadar menjadi peraturan tanpa implementasi berarti. Jika dilihat lebih jauh, Peraturan Menpan tersebut pun tidak akan banyak membantu mahasiswa yang baru lulus, karena memang itu adalah peraturan tentang “Jabatan Fungsional” yang tidak akan banyak membuka peluang bagi mahasiswa TP yang baru lulus untuk mendaftar. Misalnya dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).” Jadi lebih diutamakan atau diprioritaskan pada mereka yang telah berstatus PNS. Hal ini dikuatkan pada bab VIII tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pasal 25 ayat (1) bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat: a. Berijazah

¹ Jurusan Pendidikan TIK di Unnes menginduk pada Jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik (FT). Lebih lanjut dapat dilihat pada situs Fakultas Teknik di <http://elektro.unnes.ac.id/>. Di UNJ pun bernaung di bawah Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, lebih lanjut dapat dilihat di <http://ft.unj.ac.id/teknik-elektro/s1-pendidikan-teknik-informatika-komputer/> (diunduh pada 26 maret 2010).

paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. ...

Syarat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a ini jelas menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bukan untuk dilamar oleh para mahasiswa *fresh graduate* TP, melainkan—sebagaimana dikuatkan pada pasal 3 ayat (2)—hanya untuk mereka yang telah berstatus sebagai PNS. Dalam beberapa kesempatan, para inisiator kebijakan ini memang mengemukakan bahwa dikeluarkannya kebijakan ini adalah utamanya untuk mengenalkan dan mengesahkan bahwa profesi teknologi pendidikan masuk dalam formasi kepegawaian negeri. Hal yang utama adalah: harus ada yang mengurus ranah pekerjaan TP di dalam instansi pemerintah (dalam Peraturan Menpan tersebut memang tidak terdapat klausul yang secara khusus memberi amanat agar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ini harus ada di sekolah-sekolah, kampus dan sejenisnya). Sebagai sebuah strategi pengenalan ada dan diperlukannya TP tentu sah saja, namun jika dianggap dapat memenuhi harapan mahasiswa TP tentu tidak banyak yang bisa diharapkan dari kebijakan ini.

Harapan mahasiswa atas dikeluarkannya Peraturan Menpan No. PER/2/M.PAN/3/2009 tersebut wajar-wajar saja, karena selama ini lahan pekerjaan bagi warga TP memang tidak banyak di Indonesia, antara lain: instruktur/pelatih, desainer kurikulum dan media pembelajaran, jasa desain media pembelajaran (website pendidikan, film pendidikan dan lainnya). Sementara itu yang berada pada lingkup instansi pemerintah agaknya memang hanya ada pada beberapa instansi seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan, divisi pelatihan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), padahal harapan maksimalnya adalah masuk di sekolah menjadi guru, pengembang kurikulum atau pengelola sumber belajar.² Bahkan pada kenyataannya tidak banyak institusi swasta, bahkan termasuk dinas pendidikan dan sekolah-sekolah yang tahu bahwa terdapat profesi teknolog pendidikan lulusan TP.³ Walaupun begitu memang ada sebagian dari lulusan TP yang menjadi guru berkaitan dengan pengenalan TIK di sekolah. Justru dari

² Hal ini dapat diketahui dari studi mengenai pekerjaan yang digeluti oleh para alumni jurusan TP pada beberapa jurusan Teknologi Pendidikan, seperti Unnes, UNJ dan lainnya. Memang hasilnya beragam, mulai dari yang memang betul-betul bekerja di bidang TP dengan menggunakan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan, seperti di LPMP, di sekolah-sekolah, sampai pada banyak lulusan yang mengajar di Taman Kanak-Kanak dan lainnya.

³ Istilah profesi teknologi pendidikan sering didengung-dengungkan pada kongres Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang dapat diartikan sebagai “ahli teknologi pendidikan”. Lihat Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 50-99.

mereka yang berharap dapat menjadi guru TIK di sekolah inilah, berdirinya jurusan Pendidikan TIK dianggap akan mengurangi peluang kerja lulusan TP.

Munculnya formasi guru TIK di sekolah-sekolah pun pada dasarnya bukan karena kesadaran perlunya seorang ahli TP di tiap sekolah. Melainkan lahir karena dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memang terdapat mata pelajaran TIK untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal idealnya dalam tiap sekolah terdapat minimal satu ahli TP yang tidak sekadar bertugas mengajar TIK, melainkan juga mengelola pusat sumber belajar, melakukan evaluasi dan membantu penggunaan media dalam pembelajaran di sekolah. Adanya pelajaran TIK tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pelaksana teknis pendidikan di daerah dengan membuka formasi guru TIK untuk sekolah-sekolah. Hal ini disikapi positif oleh banyak jurusan TP dan yang berkaitan dengan TIK lain (komputer, teknik) untuk mendorong mahasiswa dan alumninya mengisi formasi guru TIK tersebut.

Kebijakan guru TIK masing-masing daerah berbeda, mungkin karena ketidaktahuan bahwa lulusan Jurusan TP adalah yang relatif ideal dalam melaksanakan tugas sebagai guru TIK, maka kemudian dalam pengumuman formasi guru TIK yang dibutuhkan di sekolah-sekolah, banyak Pemda mengambil dari lulusan Jurusan Komputer, Teknik Informatika dan sejenisnya. Indikasi tersebut terbukti ketika pada seminar nasional yang diadakan oleh Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Unnes tahun 2005 lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa tengah menyatakan dalam tulisan yang terdapat dalam prosiding seminar bahwa kualifikasi guru TIK adalah (1) sarjana Informatika dan Komputer (Infokom) plus akta IV; (2) sarjana umum plus sertifikasi keahlian; dan (3) Diploma IV Infokom.⁴

Hal itu terjadi salah satunya tentu karena memang jurusan TP tidak banyak dikenal di publik, hingga dunia kerja dan bahkan dunia pendidikan tidak tahu mengenai profesi teknolog pendidikan, sampai pada apa yang dikuasai, tugas-tugasnya apa, dan lainnya. Ini sangat ironis mengingat sebenarnya TP sudah tumbuh mulai awal tahun 1970-an ketika dibawa oleh Prof. Yusufhadi Miarso (2007) dengan membuat program-program pendidikan, seperti radio siaran pendidikan, siaran Aku Cinta Indonesia (ACI) di Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan sejenisnya, hingga berdirinya Pustekkom Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).⁵ Entah mengapa TP kemudian tidak dapat berkembang secara maksimal di Indonesia menjadi profesi yang setara insinyur, dokter, guru,

⁴ Lihat Suwilan Wisnu Yuwono, "Peran dan Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Informasi," dalam prosiding Seminar Nasional *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI&K) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Berbasis Informasi*, Semarang: 17 September 2005.

⁵ Lihat Yusufhadi Miarso, o.cit., hlm. 328-450, lihat juga dalam kata sambutan dari Arief S. Sadiman dalam buku tersebut, hlm. x-xii.

dan lainnya. Mungkin salah satunya karena memang masih sedikit para ahli TP yang intens mengkaji banyak fenomena implementasi teknologi dalam praksis pendidikan di Indonesia secara luas, mendalam, dan kemudian mempublikasikannya.

Asal Mula Teknologi Pendidikan

Mungkin karena TP tidak dapat didefinisikan secara jelas pada awalnya, hingga akhirnya menjadi bias apakah ia masuk disiplin “teknik” atau “pendidikan.” Kalau masuk di Fakultas Teknik, maka ia dapat dikatakan sebagai bagian “teknik” yang khusus menangani/mengkaji pendidikan, kalau masuk bidang pendidikan maka ia merupakan satu bidang yang menangani/mengkaji pembelajaran yang menggunakan teknologi. Namun dilihat dari genealogi lahirnya bidang kajian TP di Barat, juga dilihat dari tujuan, visi, dan praksisnya, maka TP masuk dalam bidang kajian pendidikan (de Vaney & Butler, 1996: 3-45; Miarso, 2007: 124-145). Di Indonesia secara institusional pun dibuktikan dengan didirikannya Pustekkom yang menangani teknologi untuk pendidikan berada di bawah Kemendiknas.⁶ Walaupun begitu tetap saja TP berkolaborasi dengan bidang lain, yaitu: teknologi untuk mengkaji teknologi-teknologi yang berguna dalam membantu/memfasilitasi pendidikan.

Kembali pada tataran praksis kebijakan di Indonesia, ternyata dalam sistem pendidikan nasional tidak terdapat formasi teknolog pendidikan yang menjadi lahan pekerjaan lulusan TP. Lihat misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terutama pasal 35 pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai setingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak terdapat tenaga kependidikan yang secara spesifik bertugas mengelola media pembelajaran, pusat sumber belajar, atau juga mendampingi pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan yang disebutkan adalah kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan yang relatif dekat dengan tugas dari seorang ahli teknologi pendidikan adalah “teknisi sumber belajar” yang hanya ditentukan terdapat pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar

⁶ Ibid. hlm. 134, Yusufhadi Miarso menyatakan beberapa rujukan mengenai sejarah Teknologi Pendidikan, antara lain adalah buku Paul Saettler, *The History of Educational Technology* (1968) dan *Instructional Technology: The Definition and Domains of the Field* oleh Barbara B. Seels dan Rita C. Richey (1994). Di Indonesia telah diterjemahkan untuk kalangan sendiri oleh Yusufhadi Miarso, Dewi S. Prawiradilaga dan Raphael Rahardjo dengan judul *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*, namun tidak jelas tahun terbitnya. Pada buku tersebut halaman 3-15 dapat ditelusuri bahwa Teknologi Pendidikan adalah bagian dari ranah ilmu pendidikan.

Biasa (SMALB) dan lembaga kursus.⁷ Dari ketentuan tersebut tentu kita paham bahwa “teknisi sumber belajar” hanyalah kerja teknis yang standar akademiknya tidak harus S1, di sisi lain bidang kerjanya di sekolah-sekolah luar biasa juga menjadikan posisinya sebagai minoritas “terdiskriminasi” mengingat perhatian pemerintah dan masyarakat yang sangat minim terhadap sekolah-sekolah tersebut.

Di sisi lain, posisi-posisi di Dinas pendidikan dan sekolah yang berhubungan dengan olah perangkat teknologi ternyata tidak diisi oleh lulusan TP, melainkan dari jurusan teknik, elektro, dan juga Infokom. Hal itu karena mendasarkan pada anggapan bahwa lulusan jurusan-jurusan tersebut lebih jago dalam menggunakan teknologi ketimbang lulusan TP. Alasan lain sebagaimana di atas selain jurusan TP belum familiar, tentu karena dinas dan sekolah tersebut menggunakan perspektif bahwa menggunakan teknologi untuk pembelajaran tidak memerlukan orang yang paham pendidikan dan pedagogi, namun lebih memerlukan orang yang ahli teknologi. Dalam implementasinya, guru yang dianggap telah menguasai pendidikan (*pedagogy*), cukup berkolaborasi dengan para lulusan jurusan Infokom, elektro, dan lainnya itu, hingga tidak dikhawatirkan terjadi *miss* landasan kependidikan. Jadi, para ahli komputer tersebut didukung oleh guru sebagai penjamin bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap berada dalam kaidah-kaidah pedagogik.

Kalau memang begitu, pertanyaannya adalah: apakah memang jurusan dan lulusan TP betul-betul tidak diperlukan? Sebenarnya kalau memang kolaborasi antara lulusan jurusan komputer dengan guru di sekolah dalam implementasi penggunaan teknologi dalam fasilitasi pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan jurusan TP tidak diperlukan lagi. Namun realitasnya tidaklah demikian. Karena lulusan jurusan komputer tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai implementasi teknologi dalam pembelajaran. Guru juga tidak banyak dibekali pemahaman yang memadai mengenai seluk-beluk konsep dasar TP dalam memfasilitasi pembelajaran berkaitan dengan “desain, penggunaan dan pengelolaan proses dan sumber belajar teknologis yang tepat” sesuai dengan konteks sosio-kultural, psikologis, estetika, etika dan lainnya.⁸ Pun tidak banyak guru yang dibekali kemampuan analisis dan evaluasi serta produksi media—terutama media pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan bahwa terdapat banyak fakta kesalahan pemahaman (*missunderstanding*) dan ketidakmampuan guru dan sekolah dalam mengelola dan menggunakan media pembelajaran. Misalnya banyak televisi yang diberikan kepada sekolah oleh Depdiknas untuk sarana belajar ternyata digunakan untuk menonton siaran televisi

⁷ Lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 35 ayat (1) butir “e” dan “g”.

⁸ Lihat definisi Teknologi Pendidikan dalam Alan Januszewski & Michael Molenda, *Educational Technology: A Definition With Commentary*. New York & London: Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

biasa di ruang guru, banyak televisi bantuan tersebut telah rusak karena tidak terawat, atau bahkan dicuri. Selain itu banyak alat peraga pendidikan rusak justru karena tidak pernah digunakan, baik karena guru takut rusak atau tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, serta tiadanya tanggung jawab dalam pemeliharannya (*Jawa Pos*, 30/11/09). Penggunaan *Overhead Projector* (OHP) dalam pembelajaran dan presentasi dengan *PowerPoint* juga seringkali justru tidak efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, bahkan seringkali bias karena penyampaian yang kaku, tidak tepat atau medianya kurang menarik bagi siswa (*Kompas*, 23/7/08). Sementara itu untuk membuat media yang menarik seperti film pendek dan desain lingkungan belajar yang bagus, guru kebanyakan relatif belum mampu.

Di sisi lain, guru untuk dapat betul-betul menguasai perkembangan model pembelajaran kontemporer, seperti *contextual learning-teaching*, *problem-based learning*, *critical thinking*, *communal socio-constructivism* dan lainnya masih sulit untuk mengejar, apalagi memahami fondasi dasar pembelajaran berbantuan teknologi yang cukup kompleks menyangkut ranah sosio-kultural, psikologis, estetika, etika dan bahkan filosofi serta ideologinya. Padahal mestinya guru selain menguasai perkembangan model pembelajaran kontemporer tersebut, juga harus paham dan menguasai hakikat dan berbagai praktik pedagogi, seperti pedagogi kritis, transformatif, emansipatoris, multikultural, dan lainnya (Giroux, 2005; Apple, 2004; Tilaar, 2002; Buchori, 1995; McLaren, 1995;). Dengan demikian menjadi jelas bahwa aka jurusan dan lulusan TP masih dibutuhkan untuk dunia pendidikan.

Dasar Perlunya Teknologi Pendidikan

Alasan yang lebih fundamental mengenai diperlukannya TP, di samping realitas tersebut, dapat dilihat dari penelusuran historis awal berdiri dan diakuinya teknologi pendidikan sebagai sebuah bidang kajian dan praksis.⁹ Ilmu pendidikan bertumpu pada landasan ilmu-ilmu sosio-humaniora, seperti sosiologi, komunikasi, psikologi, dan lainnya tentu filsafat termasuk di dalamnya. Sebagai sebuah praksis pendidikan, ilmu pendidikan dalam perkembangannya tidak dapat tidak harus berhadapan dengan serangkaian masalah yang jika dilihat dari perspektif disiplin keilmuan berkaitan dengan beragam ranah keilmuan dasar, seperti sosiologi, psikologi, dan lainnya tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari

⁹ Dalam paper ini TP lebih didefinisikan sebagai ranah kajian dan praksis. Praksis (*praxis*) adalah terminologi dalam tradisi pemikiran Marxian yang dikemukakan oleh Gramsci (1971) dalam *Selections from the Prison Notebooks*, yang diartikan lebih-kurang sebagai bentuk penyatuan antara gagasan atau ide-ide dan aksi-aksi nyata di masyarakat dan saling terkait dengan banyak hal. Dengan begitu, maksud TP sebagai praksis adalah menjadikan kajian TP tidak sekadar sebagai sebuah gagasan, ide, dan konsep yang berada pada tataran intelektual saja, melainkan juga menjadi sebuah praktik yang meluas berkaitan dengan konteks sosio-kultural-politik sekitar.

karena praksis pendidikan memang selalu berkaitan dengan semua bidang kehidupan dan ranah keilmuan tersebut. Salah satu perkembangan “terbaru” dalam pendidikan adalah penggunaan perangkat teknologi (*hard technology*) sebagai upaya untuk memfasilitasi dan meningkatkan capaian tujuan belajar (Januszewski & Molenda [eds.], 2008: 82-101; Somekh, 2007: 91-108).¹⁰

Dalam praksis pelaksanaan penggunaan teknologi untuk pembelajaran tersebut, TP menggaet dan menggunakan berbagai perangkat paradigma keilmuan yang berkembang dalam ranah disiplin psikologi, sosiologi, ekonomi, budaya, termasuk pendidikan (*pedagogy*) itu sendiri (lihat Januszewski & Molenda [eds.], 2008: 69-77; Miarso, 2007: 102-121). Sebagai sebuah ranah kajian dan praksis, TP tumbuh dan berkembang seiring dengan munculnya banyak masalah dalam ranah kajian dan praksis TP itu sendiri, antara lain adalah: ketimpangan sosial antara siswa kaya yang menggunakan internet dan yang tidak, bahkan juga antara siswa dan guru yang minim akses internet (*Republika*, 6/11/09), konsumsi pornografi oleh siswa dalam belajar via internet yang susah ditangkal (*Republika*, 28/12/07), suburnya praktik plagiat (*Republika*, 11/1/09) dan lainnya.

Di sinilah masalah tersebut membutuhkan kajian serius untuk menanganinya hingga memerlukan paradigma dari disiplin ilmu yang sudah mapan. Dengan demikian interdisiplinaritas, multidisiplinaritas dan transdisiplinaritas antara kajian teknologi, pendidikan, sosiologi, psikologi, filsafat, budaya dan lainnya adalah suatu hal yang tak terhindarkan (Semiawan, 2008).¹¹ Karena sekali lagi masalah-masalah tersebut hadir dalam konteks sosial yang kompleks terdiri dari berbagai ranah sosial, budaya, politik dan lainnya. Masalah-masalah itu pun tidak muncul hanya oleh satu sebab atau satu variabel yang kemudian dapat dipandang dari satu paradigma keilmuan saja. Lebih dari itu, masalah-masalah tersebut muncul karena banyak sebab dan oleh karenanya tidak dapat tidak, harus dikaji dan diselesaikan dengan menggunakan banyak paradigma keilmuan yang ada.

Oleh karena itu, mutlak hal yang harus dikuasai dalam mengimplemen tasikan teknologi dalam pendidikan tidak sekadar paham teknologi dan pedagogi, tetapi juga harus paham seluk beluk filsafat, sosiologi, psikologi, budaya, kurikulum, kebijakan, politik, ekonomi, dan lainnya. Sejauh yang dapat dicapai

¹⁰ “Terbaru” dalam hal ini diartikan sebagai “diperhatikan” secara serius, “dikaji” secara serius dan lebih spesifik dibandingkan sebelumnya. Sejak tahun 1920-an ketika radio muncul, kemudian film, yang disusul dengan televisi, teknologi dalam bentuk media komunikasi dan informasi tersebut mendapat perhatian serius dari dunia pendidikan karena potensinya sebagai media yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. Tahun 2000-an sampai sekarang bahkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi andalan utama dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

¹¹ Lihat Conny R. Semiawan, *Pendekatan Transdisiplinaritas Ilmu dalam Dunia Pendidikan*, paper disampaikan dalam Kongres IPTPI, Jakarta: 28 Agustus 2008, di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

oleh guru-guru di sekolah sekarang ini, akan teramat susah untuk dapat memiliki pra-syarat dasar penguasaan keilmuan tersebut dalam implementasi teknologi dalam pendidikan.¹² Di sinilah dibutuhkan satu kajian khusus yang kemudian disebut sebagai Teknologi Pendidikan (*educational technology*) yang mengkaji secara khusus mengenai teknologi pendidikan, lengkap dengan berbagai dasar inter, trans, dan multidisiplinaritas keilmuan tersebut. Seorang yang telah menerjunkan diri dalam teknologi pendidikan dengan demikian memiliki kewajiban untuk mengkaji secara serius, mendalam, dan meluas mengenai teknologi pendidikan (Miarso, 2007: 2-99). “Mendalam” dalam arti mengkaji satu masalah secara serius sampai pada akar masalah (filosofi dan ideologinya) dan “meluas” merambah pada berbagai masalah sosial, psikologi, etika, moral dan budaya yang ditimbulkan oleh implementasi teknologi pendidikan. Dengan demikian, sebagai sebuah kajian dan praksis, TP dibutuhkan; demikian juga dengan para ahli TP dengan Jurusan dan Program Studi TP-nya. Sebagai sub-set kajian pendidikan (*educational studies*), TP secara lebih spesifik juga mengkaji satu bidang garapan yang untuk sekarang dan masa-masa yang akan datang menjadi perhatian dan fokus dari perkembangan pendidikan dalam skala global, yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang potensial dalam memfasilitasi proses pendidikan (Januszewski & Molenda [eds.], 2008: 9).

Dasar alasan perlunya TP tersebut di atas sebenarnya sudah cukup sebagai argumentasi untuk mengembalikan TP pada hakikat keberadaannya semula. Bahwa TP, Jurusan TP dan lulusannya bukanlah seperti seorang lulusan jurusan komputer, teknik elektro, atau *broadcaster* yang menguasai urusan-urusan teknis dan teknologi saja. Lebih dari itu, jurusan TP dan lulusannya juga menguasai dasar dan ranah keilmuan lain yang terkait dengan keberadaan dan implementasi teknologi dalam pendidikan. Kelebihan TP adalah ia menguasai “pedagogi” yang luas dan mendalam sebagai syarat utama bagi seseorang yang berniat mendidik secara profesional.¹³ Dengan demikian agaknya dapat dikatakan bahwa lulusan jurusan elektro, komputer, dan sejenisnya tidak cukup layak untuk menjalankan fungsi dan peran dalam mengkaji dan mengimplementasikan teknologi dalam

¹² Pesimisme ini mengemuka karena banyaknya indikator rendahnya minat intelektual guru, termasuk kualitas guru, lihat saja dalam kasus sertifikasi di Riau yg diindikasikan sebagai plagiat. Lihat ulasan Drajat, “Plagiarisme dan Kenaikan Pangkat.” *Kompas*. Jakarta: 18 Februari 2010. Selain itu, di lapangan akan sangat mudah kita jumpai guru yang tidak memiliki minat baca tinggi, baik karena memang dia tidak berminat maupun karena kendala tidak dapat membeli buku dan mengakses internet.

¹³ Lihat juga ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Bab VI pasal 28 ayat (3) bahwa, “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial.

pendidikan secara mendalam dan luas, karena dalam perkuliahan mereka memang tidak mendapatkan materi pedagogi secara mantap.¹⁴

“Miss,” “Over” dan Reduksi Teknologi Pendidikan

Kembali pada kekhawatiran di depan mengenai tidak jelasnya peluang kerja bagi lulusan TP ketika akan dibuka jurusan pendidikan TIK, maka agakny jelas terjadi “miss,” “over” dan reduksi pemahaman mengenai TP yang berimbas pada biasanya pemahaman mengenai apa yang menjadi tugas atau pekerjaan lulusan jurusan TP. *Pertama*, terjadi “miss” dan “over” pemahaman dan harapan terhadap TP sebagai disiplin keilmuan; dan *kedua*, reduksi karena tuntutan pragmatis dunia kerja industri modern. Pada sebab pertama kita dapat melihat dari banyak paparan panjang yang berupaya untuk membangun landasan filosofis (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) TP sebagai sebuah “disiplin keilmuan”. Harapan tersebut tampaknya terlalu berlebihan, Yusufhadi Miarso (2007: 110-111) sendiri menyatakan bahwa:

Sebagai suatu spesialisasi dari ilmu pendidikan, memang mungkin teknologi pendidikan belum merupakan suatu disiplin ilmiah, karena masih terbatasnya teori yang dihasilkan yang mempunyai kemampuan generalisasi dan prediksi atas gejala yang diamatinya. Banyak teori-teori yang berasal dari disiplin keilmuan lain yang dipinjam dan diramu menjadi teori baru.

Namun dari pernyataan tersebut tetap terlihat adanya harapan TP dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang mapan dalam pengertian positivistik.¹⁵ Konsentrasi yang terlalu banyak pada upaya membangun sebuah disiplin ilmu tersebut pada akhirnya berakibat pada tidak dilihatnya secara utuh TP sebagai sebuah bidang kajian yang terbentuk atau mengambil perspektif dan pendekatan dari bidang keilmuan lain. TP kemudian terlihat menjadi arogan sebagai bidang kajian yang kaku, karena terbatas oleh keinginannya sendiri untuk menjadi disiplin ilmu. TP dalam praksisnya kemudian menjadi tidak produktif dan tidak banyak bisa menyelesaikan problem pendidikan di mana media pembelajaran di gunakan.¹⁶

¹⁴ Pada jurusan yang murni teknik, elektro, komputer, *broadcast* dan sejenisnya memang tidak diajarkan mengenai pedagogi, walaupun menjadi bagian dari universitas eks Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

¹⁵ Istilah “generalisasi” dan “prediksi” adalah termasuk kata kunci yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah sesuatu tersebut dilihat dari kerangka paradigma positivisme atau tidak. Lebih jauh lihat misalnya Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, London: Sage Publication, 1985, hlm. 110-119 & 183-184.

¹⁶ Lihat misalnya perpustakaan di Pascasarjana UNJ, atau di Pustekkom sebagai bidang praksis TP secara resmi di Indonesia. Ternyata memang belum banyak literatur yang mengkaji praksis TP berkaitan dengan konteks sosial, kultural, dan politik. Lebih banyak literatur yang membahas teknis-metodologis aplikasi TP saja (tips-tips desain, produksi, implementasi dan evaluasi TP).

Sikap “kaku” dan “tertutupnya” TP tersebut pada akhirnya juga menafikan keberadaan paradigma, ideologi dan hakikat filosofis TP itu sendiri di tengah bidang kajian dan keilmuan, juga di tengah realitas dan konteks sosio-kultural. Keinginan untuk menjadi disiplin ilmu dalam pengertian positivistik tersebut menjadikan TP memandang dan memahami dirinya lepas dari konteks sosio-kulturalnya. TP kemudian kering kesadaran ideologis dan paradigmatisnya, karena TP menjadi tidak sensitif terhadap konteks sosio-kultural sekitarnya. Beberapa fenomena dan masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan tertentu kemudian diabaikan untuk tidak dikaji dengan dalih untuk menjaga TP sebagai sebuah “disiplin ilmu”.

Dalam upaya menjadi “disiplin ilmu” tersebut TP telah terjebak pada nalar pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan ala positivisme yang sebenarnya justru kontraproduktif dengan tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri untuk membenahi kondisi sosio-kultural masyarakat yang kompleks (lihat Lincoln & Guba, 1985: 36-38). Inilah yang disebut sebagai “*miss*” dan “*over*” pemahaman terhadap TP, yakni salah paham (*misunderstanding*) dan harapan yang berlebihan (*over-expectation*) terhadap TP untuk menjadi disiplin keilmuan yang mapan. Hal tersebut terjadi karena memang basis paradigma TP mulanya memang positivisme (Burton, *et al*, 1996: 46-65), pun ketika masuk ke Indonesia tahun 1960-an, ilmu pendidikan di Indonesia masih begitu kuat didominasi oleh paradigma positivistik dan teori belajar behavioristik. Sampai akhir tahun 1990-an hegemoni paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan di Indonesia belum dapat digeser oleh paradigma naturalistik, fenomenologi, kritis, konstruktivis, apalagi posmodernis. Akibatnya, pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan tetap terjadi dan obsesi untuk menjadi disiplin ilmu tetap terjaga. Selain itu para dosen di kampus kependidikan kemudian juga tidak banyak berkembang pemahaman mereka dalam paradigma ilmu pengetahuan. Tidak banyak literatur yang berparadigma selain positivistik masuk dan beredar di rak-rak perpustakaan kampus-kampus kependidikan sampai akhir tahun 1990-an. Pada beberapa jurusan TP di kampus-kampus kependidikan (terutama kampus eks IKIP) sampai sekarang bahkan dapat dikatakan belum banyak terdapat literatur yang memadai mengenai TP, baik yang fundamental mengenai paradigma pengetahuan maupun isu-isu kontemporer.¹⁷

Kemampuan dosen jurusan TP dalam menjabarkan mengenai fondasional TP pun di bawah rata-rata, karena mereka juga rata-rata lulusan dari TP di dalam negeri. Jika dilihat secara historis, hal tersebut dapat dipahami, karena mereka berasal dari jurusan Jurusan Didaktik dan Kurikulum dan sejenisnya yang kemudian bermetamorfosis menjadi jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Kerangka paradigmatis yang tidak kuat juga dapat dilihat pada beberapa hasil riset skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa TP di banyak jurusan TP di Indonesia.

¹⁷ Lihat di perpustakaan pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) misalnya, tidak banyak buku isu-isu terkini kajian Teknologi Pendidikan.

(KTP) atau Teknologi Pendidikan (TP) saja.¹⁸ Sebenarnya keberadaan “kurikulum” pada jurusan TP (misalnya di Unnes disebut jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan) membawa sedikit “keberuntungan,” karena membawa pengertian TP pada perspektif yang relatif “meluas” sampai pada kajian kurikulum. Namun pada perkembangan selanjutnya, ketika beberapa jurusan KTP hendak menjadi jurusan TP saja, maka perspektifnya TP justru menjadi sempit dalam pengertian TIK saja.¹⁹ Hal tersebut tentu sangat ironis dan berbahaya.

Pada kenyataannya, baik pada jurusan KTP maupun TP saja, mata kuliah yang diberikan belum dapat terintegrasi dalam satu bentuk kurikulum yang betul-betul mampu menopang TP, hingga belum dapat memberikan pemahaman yang benar tentang TP serta mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan kajian dan implementasi TP yang lengkap. Mata kuliah filsafat misalnya, seringkali terputus dari upaya untuk mengkaji “teknologi” dan “pendidikan” dan “teknologi pendidikan” itu sendiri secara filosofis. Justru seakan pembelajaran filsafat masih berasyik-masyuk dengan dirinya sendiri hingga tidak mampu menjadi penopang dan fondasi keilmuan TP secara fundamental. Mata kuliah sosiologi pendidikan juga merupakan contoh lain: ia diberikan seolah-olah terpisah dari praksis TP dalam konteks sosio-historis, dan menjadi mata kuliah yang diajarkan tersendiri entah sebagai apa.

Demikian juga dengan mata kuliah psikologi.²⁰ Disintegrasi antarmata kuliah tersebut sebenarnya wajar terjadi, karena dosen-dosennya—walaupun ahli dalam filsafat dan sosiologi pendidikan misalnya—relatif tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang TP, hingga tidak dapat dengan tepat membahas dan mengaitkan filsafat, sosiologi, psikologi dan mata kuliah lainnya dalam kajian dan praksis TP. Agaknya masing-masing dosen mata kuliah tersebut sekadar ahli dalam bidangnya masing-masing, namun tidak dapat menangkap dan memahami substansi TP secara tepat. Dalam praktiknya, sebelum proses perkuliahan dimulai, tidak banyak diulas mengenai kaitan masing-masing

¹⁸ Jurusan Didaktik yang menjadi embrio jurusan TP dihapuskan karena Sekolah Pendidikan Guru (SPG) juga dihapuskan, sebelumnya alumni Jurusan Didaktik bidang kerjanya adalah mengajar di SPG. Oleh karenanya pada beberapa kampus, misalnya Unnes, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas Negeri Padang (UNP) dan lainnya, jurusan TP disebut sebagai jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP). Dapat dilihat pada sejarah masing-masing jurusan tersebut.

¹⁹ Di Unnes program studinya pada S1 disebut Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), namun jurusannya adalah Teknologi Pendidikan (dapat dilihat pada brosur dan dokumen jurusannya). Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jurusannya tetap Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, namun terdapat spesialisasi, yaitu Program Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, namun karena Program Pengembangan Kurikulum dihapus, sekarang tinggal program TP, lihat di <http://kurtek.upi.edu/e-learning1/?page=sejarah.html> (diunduh pada 20 Maret 2010).

²⁰ Berdasarkan observasi dan pengalaman penulis selama menjadi mahasiswa S1 TP di Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan S2 TP di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

mata kuliah tersebut dengan kajian dan praksis TP secara tepat dan jelas. Proses pembelajaran terlihat bergerak sendiri-sendiri, partikular dan tidak berujung pada substansi TP yang jelas dan tepat. Hampir boleh dikatakan jarang terdapat diskusi intensif untuk “menyamakan persepsi” dan memperbarui kembali pemahaman bersama tentang TP sesuai dengan perkembangan teori dan teknologi kontemporer oleh para dosen-dosen dalam satu forum tertentu di Jurusan masing-masing. Di sisi lain, pada jenjang pendidikan S2 dan S3 TP di Indonesia pun tidak banyak berbeda dengan jenjang S1 TP dilihat dari mata kuliah yang diberikan, tugas kuliah, fokus kajian dan kedalaman bahasan.²¹ Akhirnya, fenomena umum yang terjadi adalah: TP direduksi sekadar sebagai “bidang pekerjaan,” yakni: pekerjaan menggunakan teknologi dalam membantu proses pembelajaran lebih baik. Jadi, kalau ada komputer rusak di lab. Sekolah misalnya, maka lulusan TP dipanggil untuk memperbaikinya. Namun ketika terjadi masalah etika dan konflik pada siswa karena penggunaan internet dalam pembelajaran, maka yang dipanggil adalah guru Bimbingan Konseling (BK) atau guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), bukan lulusan TP.²² Fenomena *cyber bullying* (lihat Kowalski, *et al*, 2008) misalnya, adalah masalah yang melibatkan para ahli TP di sekolah dalam penanganannya beserta guru-guru lain, karena ahli TP-lah yang sebenarnya paling tahu mengenai mekanisme operasional dunia *cyber*.

Kasus-kasus tidak dilibatkannya ahli TP di sekolah dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan media pembelajaran (internet, televisi, ebook dan lainnya) agaknya terjadi lebih karena ketidaktahuan guru dan sekolah mengenai kualifikasi atau “*job desk*” lulusan TP dalam sebuah institusi pendidikan (sekolah, kampus, dan lainnya). Padahal dalam definisi TP yang dirilis oleh Association for Educational Communication and Technology (AECT), “etika” (*ethics*) mendapatkan penekanan utama dalam kajian dan praksis TP (Januszewski & Molenda [eds.], 2008: 1).²³

²¹ Lihat misalnya kurikulum pada Jurusan TP S1 di Unnes, dapat diakses melalui <http://teknodik.unnes.ac.id/> dan <http://teknodik.net/>. Hal itu agaknya lagi-lagi karena belum terdapat pemahaman yang mendalam dan sekaligus luas mengenai TP, bahkan entah kenapa lulusan dari luar pun pada akhirnya gagal untuk menerjemahkannya dalam konteks TP di Indonesia, walaupun tentu tidak semuanya begitu.

²² Hal ini sudah umum dialami oleh mahasiswa TP yang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah-sekolah atau guru TIK yang berasal dari TP dan sudah mengajar di sekolah-sekolah (berdasarkan pada penuturan beberapa mahasiswa TP yang sedang PPL dan guru alumni TP di beberapa sekolah).

²³ AECT merupakan satu organisasi para ahli TP internasional yang bermarkas di Amerika. Paradigma TP sampai sekarang tampaknya masih menjadi mainstream dalam kajian dan praksis TP di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Dapat dilihat dari banyak buku rujukan perkuliahan yang diberikan pada mahasiswa berasal dari ahli TP lingkaran AECT.

Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.

Dalam definisi TP dari AECT yang disepakati pada tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa TP adalah kajian (*study*) dan praktik etis (*ethical practice*) dalam memfasilitasi pembelajaran. Selain itu agaknya masyarakat awam, bahkan termasuk para guru dan dosen relatif menganggap teknologi hanya sebagai alat-alat elektronik, terutama komputer; sedangkan cara, strategi, metode, pendekatan, manajemen, dan sejenisnya tidak dianggap sebagai teknologi. Intinya adalah: teknologi berbentuk barang fisik yang canggih, yang bukan barang fisik tidak dapat disebut sebagai teknologi. Inilah pemahaman yang kurang tepat namun sudah kaprah di masyarakat kita sampai sekarang.

Pragmatisme Dunia Kerja

Selain ketidakjelasan pemahaman tentang TP yang dibawakan oleh dosen-dosen TP sendiri, reduksi TP juga terjadi akibat dari tuntutan dan desakan pragmatisme dunia kerja. Dalam tatanan masyarakat modern sekarang ini, seakan semua perputaran kehidupan bermuara pada akumulasi kapital. Begitu pula dengan pendidikan, seakan semua praksis pendidikan tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, sebagai sarana mengeruk kekayaan dan kebahagiaan. Terlebih lagi ketika institusi pendidikan tersebut sudah menjadi bagian dari institusi neo-liberal yang bertugas memasok tenaga siap pakai untuk ditempatkan dalam posisi dan profesi yang ada dalam tatanan modernitas (Giroux, 2005; Apple, 2004; Tilaar, 2009; Darmaningtyas, *et al.*, 2009; Torres, 2009). Tampaknya sebagian besar masyarakat pun mengiyakan perspektif tersebut. Ketika anak-anak mereka masuk kuliah, doa mereka adalah: semoga dapat masuk di kampus *bonafide* dengan jurusan yang bagus dan prestise, hingga nanti setelah lulus dapat menempati posisi kerja yang bagus. Begitu juga rata-rata yang terjadi dengan mahasiswa jurusan TP. Terang ketika masuk jurusan TP mereka ingin mendapatkan bekal memadai untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang dan apa yang dipelajarinya. Walaupun mesti diakui ada banyak mahasiswa yang masuk TP “tanpa sengaja.” Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya jurusan TP bagi mereka yang “tanpa sengaja” tersebut merupakan pilihan kesekian setelah jurusan lain, namun ketika telah berada di dalamnya mereka tetap mengharapkan kejelasan bidang kerja mereka.²⁴ Tidak seperti pendidikan kedinasan yang memberikan kejelasan posisi kerja setelah lulus (seperti: pendidikan kepolisian, perpajakan, militer), kampus nonpendidikan kedinasan tidak memiliki kewajiban yang ketat dalam memberikan kepastian kerja. Namun,

²⁴ Hasil observasi dan penuturan beberapa mahasiswa S1 TP semester awal di Semarang (Unnes) dan Jakarta (UNJ) pada akhir 2009.

bukan berarti kampus dapat lepas tanggung jawab, karena bagaimana pun juga kualitas pendidikan dan alumni sebuah kampus secara umum salah satunya ditunjukkan dengan tingkat penerimaan dunia kerja terhadap mereka.

Di sinilah, jurusan TP juga dituntut untuk memberikan kepastian kerja kepada mahasiswanya sesuai dengan bidang keahlian yang telah mereka pelajari di perkuliahan. Secara pragmatis, beberapa jurusan TP pun akhirnya mengambil langkah praktis dengan mendasarkan perkuliahannya pada kebutuhan dunia kerja, yang secara otomatis sebenarnya menafikan hakikat filosofis TP itu sendiri. Ketika hampir semua sendi kehidupan manusia sekarang ditopang dan membutuhkan TIK, mulai dari aktivitas pekerjaan, pendidikan, belajar sampai hobi dan hiburan semuanya membutuhkan TIK (lihat Lister, *et al*, 2009), maka para mahasiswa dan dosen jurusan TP pun menjadikan TIK tersebut sebagai sebuah “harapan baru”. Harapan baru dalam arti TIK sangat potensial untuk menjadi bidang garapan bagi TP, yakni dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pendidikan secara umum. Akhirnya beberapa jurusan TP mengambil langkah untuk memfokuskan perkuliahan dan kajiannya pada TIK, dengan kata lain TP kemudian direduksi menjadi sekadar TIK saja. Langkah tersebut agaknya dapat dipahami ketika mendapati kenyataan sebagaimana dikemukakan di depan bahwa TP sebagai sebuah kajian dan praksis serta profesi kependidikan, ternyata tidak banyak diketahui atau bahkan tidak diakui oleh khalayak maupun institusi pendidikan sendiri, hingga menjadi kegelisahan mahasiswa TP mengenai ketidakjelasan masa depan mereka setelah lulus. Dengan tanggung jawab memberikan kejelasan pekerjaan yang dipikul oleh jurusan TP, maka jurusan TP memilih fokus pada TIK. Harapannya adalah agar mahasiswanya nanti dapat bekerja sebagai tenaga yang ahli dalam bidang TIK yang sedang menjadi tren dan dibutuhkan masyarakat.²⁵ Tuntutan tanggung jawab jurusan dan kebutuhan pasar akan TIK tampak begitu kuat tarikannya dalam pengambilan keputusan orientasi jurusan TP tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa pragmatisme pasar dan kerja lebih dipentingkan ketimbang substansi dasar pendidikan itu sendiri.

Masalah yang timbul adalah ketika melihat realita tren pembelajaran TIK di Indonesia sekarang ini sekadar menekankan pada penggunaan saja, tanpa mengaitkan dengan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi, juga minim didasari oleh acuan teoretik pedagogi yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada fenomena pembelajaran berbasis TIK yang marak sekarang ini, baik siswa, mahasiswa, guru dan dosen lebih banyak sebagai pengguna dan pengkonsumsi berbagai produk TIK saja tanpa analisis yang jelas untung-rugi dan efektif-efisiensinya. Mereka lebih banyak menggunakan produk multimedia, games edukatif, internet dan lingkungan virtual yang terdapat di dalamnya saja. Sedangkan beberapa produksi TIK dalam bentuk multimedia, *games* edukatif, website dan lainnya relatif masih

²⁵ Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa dan dosen TP Unnes pada akhir 2009.

sederhana dan agaknya sekali lagi tidak banyak menggunakan pertimbangan paradigma ilmu sosial, budaya, psikologi, seni, pedagogi dan lainnya secara mendalam.²⁶

Selain itu, baik penggunaan maupun produksi TIK untuk pendidikan tersebut rata-rata juga tidak dikaji secara serius dari berbagai perspektif paradigmatis. Padahal TP sebagai sebuah kajian dan praksis bukanlah sekadar mengenai teknik penggunaan produk TIK saja, melainkan berkaitan dengan ranah kajian keilmuan yang lintas, inter, dan multidisiplin. Di samping itu, TP juga berkaitan dengan ranah kehidupan yang kompleks dalam praksis implementasinya. Dengan demikian, ketika TP direduksi menjadi TIK akhirnya menjadikan TP sebagai bidang teknis yang makin kering diskursus intelektualnya. Ketika implementasi TIK dalam pendidikan sekadar penggunaannya saja (jarang dilakukan riset mendalam dan luas tentang desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran TIK di pendidikan), maka kira-kira begitu juga yang dipelajari oleh mahasiswa TP dalam perkuliahan pada jurusan TP yang telah direduksi menjadi TIK tersebut. Dengan kata lain, karena mengikuti tren yang lebih banyak pada penggunaannya saja tersebut, maka yang dipelajari pun sekadar implementasinya saja. Pada akhirnya tidak ada bedanya antara mahasiswa jurusan komputer, desain grafis, dengan mahasiswa Jurusan TP, bahkan mereka lebih jago dalam desain TIK ketimbang mahasiswa TP, karena walau fokus ke TIK sedikit banyak tetap mempelajari materi pendidikan juga. Di sinilah, ketika mengikuti tren pasar akhirnya menjadikan jurusan TP kalah bersaing dengan jurusan lainnya yang memang lebih kompeten dalam bidang TIK seperti jurusan informatika dan komputer. Selain itu juga jelas mengakibatkan tidak dikajinya secara serius dan mendalam ranah kajian dan praksis TP itu sendiri. Pragmatisme dunia kerja telah ikut memberi andil bagi runtuhnya TP baik sebagai sub-bidang kajian dalam pendidikan, sebagai bidang kajian dan praksis, maupun sebagai sebuah profesi kependidikan.

Bias dan Kegamangan Orientasi

Lebih jauh lagi, akibat dari reduksi tersebut, materi perkuliahan pun menjadi tidak tertata selain tidak terintegrasi dengan bagus sebagaimana dikemukakan di depan. Beberapa mata kuliah diberikan untuk sekadar mengikuti tren pasar, seperti: (1) *broadcasting*, (2) kewirausahaan, dan bahkan (3) pengelolaan rumah produksi (*production house*).²⁷ Kurikulum yang ada dapat dikatakan sebagai: terlalu banyak

²⁶ Lihat misalnya *booming* para guru membuat weblog atau web personal, rata-rata weblog yang dimiliki oleh para guru tersebut relatif sederhana. Intinya mereka sekadar membuat web personal yang sekiranya dapat digunakan sebagai media interaksi dengan siswa dan sesama guru, tanpa banyak memikirkan efek psikologis dan sosio-kulturalnya.

²⁷ Lihat kurikulum jurusan S1 TP Unnes pada <http://teknodik.net/> dan <http://teknodik.unnes.ac.id/> (diunduh pada 21 Maret 2010).

materi diberikan karena gagap orientasi dunia kerja jurusan TP. Mata kuliah tersebut “disusupkan” sebagai upaya untuk membekali dan antisipasi bagi mahasiswa dalam menjaring pekerjaan setelah mereka lulus nantinya, terutama antisipasi kalau mereka tidak diterima dalam institusi pendidikan formal. Karena sempitnya pemahaman tentang TP, mata kuliah filsafat, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, kurikulum, evaluasi pendidikan, dan lainnya tidak dapat berperan sebagai fondasi kajian dan praksis TP. Akhirnya TP dipahami sekadar sebagai praktik desain, implementasi, dan evaluasi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dangkal dan teknis belaka.

Mata kuliah yang belum tertata secara sistematis dalam mendukung bidang kajian dan praksis TP tersebut, dan juga perkuliahan yang seringkali teknis dan dangkal adalah bukti dari bias dan kegamangan orientasi jurusan TP yang pada hakikatnya juga menunjukkan bias dan kegamangan orientasi TP sebagai sebuah ranah kajian dan praksis di Indonesia sekarang ini. Contoh bias yang lebih konkrit juga dialami mahasiswa pada masa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Mereka banyak ditempatkan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di regional sekitar kampus dan Balai Pengembangan Multimedia (BPM); untuk jurusan TP di Jakarta (UNJ) mereka banyak ditempatkan di Pustekkom, Universitas Terbuka (UT), dan Pusat Sumber Belajar (PSB). Dulu tidak banyak atau bahkan belum ada yang ditempatkan di sekolah-sekolah sebagai pengkaji dan pengembang teknologi pendidikan, tentu karena ketidaktahuan mengenai perlunya posisi tersebut di sekolah dan ketidakberanian jurusan TP membuat terobosan baru ke sekolah-sekolah.

Sekarang dengan adanya posisi guru TIK di sekolah, banyak mahasiswa yang PPL di sekolah-sekolah. Namun, ketika mereka berada pada institusi-institusi pendidikan tersebut, mereka biasanya juga tidak mendapat berperan yang sebagaimana mestinya menjadi tugas seorang “ahli TP.” Hal itu karena pada institusi tersebut pun mahasiswa TP relatif dianggap seperti mahasiswa jurusan informatika, komputer, desain grafis, dan sejenisnya yang bertugas mendesain program, memproduksi, dan “mengevaluasinya” secara dangkal. Mereka yang PPL di sekolah-sekolah itu kebanyakan sekadar berlatih menjadi guru TIK saja, belum berlatih menjadi ahli TP yang mestinya memegang peran penting dalam mendesain dan mengelola media pembelajaran di sekolah.²⁸ Bahkan ada mahasiswa TP yang sampai minta pindah ke jurusan yang dirasa masa depannya lebih terjamin, seperti jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), pendidikan bahasa Jawa, Bimbingan dan Konseling dan lainnya.²⁹ Banyak

²⁸ Berdasarkan pada wawancara beberapa mahasiswa TP Unnes yang telah melaksanakan PPL di Semarang.

²⁹ Terdapat mahasiswa yang selain kuliah di TP dia mengambil kuliah di kampus swasta dengan bidang IT, atau bahkan ada yang sama sekali keluar dan kemudian masuk dalam jurusan IT di kampus lain.

mahasiswa TP yang setelah berkuliah satu atau dua semester kemudian merasa salah jurusan, salah satunya ketika mendapati kenyataan prospek kerja lulusan TP suram. Sebagaimana sedikit diulas di depan, banyak mahasiswa yang masuk jurusan TP karena tidak sengaja, tidak tahu, atau tidak ada pilihan lain. Para siswa SMA yang mau mendaftar di perguruan tinggi negeri ketika memilih jurusan TP rata-rata alasannya karena: (1) memilih untuk jaga-jaga kalau pilihan pertama tidak lolos; (2) karena penasaran dengan TP; (3) karena TP dikira pendidikan teknik atau pendidikan teknologi; dan (4) karena ingin menjadi guru TIK.³⁰ Pengetahuan dan pemahaman awal yang tidak lengkap mengenai TP akhirnya menjadikan mahasiswa TP pada umumnya juga tidak dapat menentukan sikap secara jelas, termasuk goyah untuk pindah jurusan.³¹

Menjernihkan Teknologi Pendidikan

Berdasarkan pada reduksi TP sebagaimana disampaikan di depan, maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah: untuk mendapatkan hak dan jati dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan oleh TP? Hak dalam hal ini adalah hak TP untuk mendapatkan posisi sesuai dengan bidang keahlian, peran, dan tanggung jawabnya dalam sistem pendidikan, terutama pendidikan formal. Jati diri yang dimaksud di sini tentu adalah hakikat TP secara filosofis dan praksis, secara esensial dan eksistensial. Untuk keperluan praktis, pertanyaan tentang hakikat “jati diri” tersebut kita “simpan” dulu dan akan kita ulas secara lebih serius pada bahasan lain. Mari kita konsentrasi pada pertanyaan tentang hak terlebih dahulu dengan mempertanyakan: apakah baiknya TP mengikuti permintaan tren dan pragmatisme pasar (dunia kerja) atau tetap berpegang pada landasan ideal dari ranah kajian dan praksis TP? Pertanyaan tersebut mungkin memang terlalu mempertentangkan keduanya (dunia kerja dan bidang keilmuan), namun setidaknya itu adalah upaya untuk mempermudah dalam menjelaskan reposisi TP (*repositioning*). Berdasarkan pada pertanyaan dasar tersebut, sebagai upaya untuk reposisi TP secara praktis sekarang, terdapat beberapa pertanyaan lagi yang mesti dijawab. Pertanyaan ini muncul dalam perbincangan keseharian mahasiswa dan dosen dalam memutuskan berbagai orientasi dari banyak jurusan TP di Indonesia sekarang ini, termasuk orientasi ke TIK *an sich*. Minimal terdapat 2 (dua) pertanyaan dan 1 (satu) pernyataan.

³⁰ Dari hasil wawancara sekilas dengan mahasiswa semester awal di Semarang (Unnes) dan Jakarta (UNJ). Motivasi untuk menjadi guru TIK relatif baru, yakni ketika sekarang ini di sekolah-sekolah dibutuhkan guru TIK untuk mengajar mata pelajaran TIK.

³¹ Hal yang patut disayangkan juga adalah: pada saat pembekalan bagi siswa-siswa SMA dan yang sederajat ketika mereka akan melanjutkan kuliah, rata-rata belum banyak memiliki gambaran mengenai bidang kerja dari lulusan jurusan TP, karena TP memang belum familiar di sekolah-sekolah. Sebenarnya tidak hanya tentang bidang TP saja, dalam banyak kasus rata-rata sekolah-sekolah tersebut tidak memberikan pemahaman dan arahan yang jelas mengenai jurusan-jurusan yang akan diambil siswa-siswinya sesuai dengan bakat, minat dan potensi mereka.

Pertama, bukankah pendidikan bertujuan untuk mencetak tenaga kerja, atau minimal memberi kompetensi yang diperlukan untuk dapat bekerja sebaik mungkin setelah lulus nantinya? Dan bukankah hal itu artinya mesti mengarahkan jurusan pada pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? *Kedua*, sementara itu bukankah pendidikan dan pembelajaran harus berdasarkan pada realitas sosio-kultural? Bukankah realitas praksis pembelajaran sekarang yang relatif dekat dengan ranah TP adalah TIK? Dengan kata lain, TIK adalah tren dan kebutuhan dalam pendidikan sekarang ini, lalu mengapa tidak mengikuti tren dan tuntutan kebutuhan TIK tersebut? *Ketiga*, pemenuhan tuntutan, kebutuhan, dan tren ini adalah keniscayaan yang harus “diakomodasi” oleh jurusan TP. Karena kalau tidak begitu (tidak mengikuti tren TIK), maka lulusan TP tidak akan laku di pasaran dan jadilah mereka bagian dari pengangguran terdidik. Mari kita bahas satu persatu. Institusi pendidikan, dalam hal ini adalah kampus, salah satu tugasnya memang memberikan bekal kemampuan bagi mahasiswanya agar dapat digunakan sebaik-baiknya di dunia kerja setelah mereka lulus nantinya. Benar juga bahwa, jika memang pendidikan ditujukan untuk dunia kerja, maka kemampuan yang harus diberikan pada mahasiswa adalah yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Namun, itu bukan satu-satunya tugas pendidikan, dan bahkan bukan yang utama dan terutama. Dunia kerja (berkaitan dengan industri, ekonomi, perdagangan, bisnis) bukanlah tujuan utama dalam pendidikan, yang utama dalam pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang bertujuan memanusiakan manusia, mencerdaskannya, memerdekakannya, membudayakannya, dan membentuk karakter dirinya (lihat misalnya Freire, 1970; Surakhmad, 2009; Tilaar, 2002).

Benar juga bahwa pembelajaran dan pendidikan mesti merujuk pada realitas sosial-kultural, kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Di sinilah perbedaannya. Realitas sosio-kultural, kebutuhan, dan tuntutan apa yang dirujuk oleh TP? Kebutuhan dan tuntutan yang dirujuk oleh TP bukanlah pekerjaan dan dunia kerja semata, melainkan kebutuhan dan tuntutan TP dalam memfasilitasi pembelajaran (Januszewski & Molenda [eds.], 2008). TIK memang menjadi tren dalam perkembangan pendidikan kontemporer, oleh karena itu menguasai TIK juga dapat dikatakan sebagai tuntutan dan kebutuhan. Namun bukan berarti kemudian TP berubah menjadi sekadar mengkaji TIK belaka, yang artinya ikut-ikutan tren. Terdapat dimensi ideal yang tetap harus dipegang dalam kajian dan praksis TP. Mengakomodasi TIK dalam TP berarti mengkaji ranah psikologis, sosiologis, kultural, ideologis dan juga teknis berkaitan dengan TIK dan pendidikan.

Kalau TP berorientasi penuh pada pasar dan dunia kerja, maka jurusan TP akan sekadar menjadi lembaga pencetak tenaga kerja yang bertujuan profit dan duit. Padahal TP sebagai bidang kajian dan praksis pendidikan dengan menggunakan teknologi, tidak semata-mata dapat direduksi sebagai “bidang kerja” yang tujuan utamanya adalah untuk mencari dan menghasilkan uang. Hal

itu karena praksis TP adalah praksis mendidik, sebagaimana guru yang juga tidak menjadikan profesi guru dan aktivitas mendidik sebagai bidang kerja yang tujuan utamanya untuk mendapatkan uang (Surakhmad, 2009). Pengertian aktivitas “kerja” dalam praksis TP dan pendidik pada umumnya dapat dikategorisasikan sebagai bidang atau aktivitas kerja sosial, kemanusiaan, kultural, dan moral. Bukan “kerja” yang sepenuhnya berdimensi transaksi ekonomi yang tujuan utamanya memang untuk mendapatkan keuntungan profit.

Pengertian ini bukan berarti bahwa aktivitas mendidik seperti guru dan bidang kerja TP tidak pantas menuntut gaji tinggi, sama sekali bukan. Bahkan sebaliknya, justru karena bidang garapan TP sebagaimana guru pada umumnya berdimensi sosial-kemanusiaan, maka gajinya harus tinggi. Bukan berarti ketika sebagai pekerja sosial dan pengabdian pada kemanusiaan lantas gajinya harus kecil. Bahkan idealnya lebih tinggi dari gaji pekerjaan yang memang tujuan utamanya sekadar untuk mencari duit. Karena mendidik adalah soal membentuk dan memuliakan manusia, bukan sekadar mencari duit. Gaji di ini bukan tujuan utama, melainkan adalah atribut yang melekat dan niscaya ada pada aktivitas pedagogi tersebut. Gaji tinggi tersebut adalah hak yang harus diterima selain sebagai penghormatan atas pengabdianannya pada kemanusiaan, juga karena telah turut melaksanakan upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” (lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Hal yang sangat berbahaya ketika menganggap bahwa TP sebagai bidang kerja yang tujuan utamanya mencari keuntungan profit adalah: TP menggantungkan diri pada tren pasar, dengan asumsi tren pasar tersebut akan mendatangkan untung besar, dan akibatnya ranah ideal pendidikan di dalam TP dinafikan. Dalam hal ini adalah fenomena mengikuti tren pembelajaran berbasis TIK dalam realitas pendidikan yang sangat teknis yang kemudian menafikan hal-hal esensial dalam TP.³² Selain itu jurusan TP akan menjadi tiada beda dengan lembaga kursus dimana misalnya ada kebutuhan atau tren menguasai komputer dasar, maka dibuatlah kursus komputer dasar; ada tren bahasa Inggris, maka dibukalah kursus bahasa Inggris, dan lainnya tergantung tren dan kebutuhan. Dengan demikian, tren teknologi informasi dan komunikasi yang datang sekarang ini adalah bagian dari TP, bukan sesuatu yang lain, namun juga bukan TP sepenuhnya. Di sinilah, TP tidak menafikan TIK sebagai sebuah perkembangan teknologi yang berguna bagi pendidikan terkini dan kemudian menjadi tren. Hanya saja TP menempatkan TIK sesuai dengan proporsinya, yakni bagian dari TP. Bentuk apresiasi TP terhadap tren TIK tidak kemudian menjadikan TP berubah menjadi TIK, atau dalam praktik akademik: Jurusan atau Program Studi TP menjadi Jurusan atau Program Studi Pendidikan TIK. Apresiasi yang mesti

³² Pada jurusan TP di Unnes dan UNJ misalnya, analisis konteks sosial, kultural, psiko-sosial diberikan seadanya saja. Dalam pengertian tidak begitu mendalam dan luas dalam mengkaji TP dalam konteks sosial, kultural, dan psiko-sosial tersebut.

dilakukan antara lain adalah dengan mengkaji secara serius dari praksis TIK dalam pembelajaran, dari perspektif ideologi, sosiologi, psikologi, kultural, ekonomi, dan lainnya

Terakhir, kekhawatiran kalau TP tidak mengikuti tren dan kebutuhan praktis dunia kerja, maka jurusan TP dan lulusannya tidak akan laku, sebenarnya tidak perlu ada. Asalkan secara struktural para pakar TP, jurusan TP, dan lainnya dapat memberikan penjelasan bahwa TP memang merupakan bidang kajian dan praksis yang sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama di sekolah dan kampus. Implementasi TIK dan berbagai kebutuhan pendidikan serta masalah yang timbul tidak dapat ditangani hanya oleh kemampuan penguasaan TIK saja, namun harus lebih dari itu, yakni “kemampuan dan keahlian TP.” Para mahasiswa Jurusan Infokom dan lainnya relatif hanya menguasai teknis TIK saja. Pun ketika terdapat jurusan Pendidikan TIK, kemampuan yang dimiliki relatif hanya sebagai guru atau mungkin saja “tukang mengajar” TIK di sekolah. Bukan dan belum kemampuan analisis dan desain TP secara komprehensif. Penjelasan argumentatif seperti inilah yang harus dipublikasikan dan dibawa ke sekolah, kampus dan pengambil kebijakan pendidikan.

Reposisi dan Reorientasi Teknologi Pendidikan

Kiranya penjelasan atau upaya penjernihan terhadap bidang kajian dan praksis dari TP di depan sudah dapat menjadi acuan dalam upaya mempertanyakan kembali posisi TIK dalam TP dan arah kajian dan praksis TP. Sebagaimana tujuan awal dari tulisan ini yang ingin memberikan sebuah penegasan pada level praksis, taktis, dan rekomendatif, maka perlu diambil langkah untuk melakukan reorientasi TP. Setidaknya reposisi dilakukan dalam kasus TIK di dalam TP ini adalah dengan menempatkan TIK sesuai dengan proporsinya, yakni: TIK sebagai bagian dari TP, bukan sebaliknya, baik dalam konsep maupun praktiknya. Hal yang juga penting adalah: TP jangan sampai didikte oleh pasar, namun juga bukan berarti mengacuhkan pasar sama sekali, lebih dari itu adalah mesti memperhatikan dan membuat sikap menghadapi pasar dengan tetap berpegang pada dasar kajian dan praktik TP yang ideal tersebut, karena terdapat dimensi pedagogi yang tidak boleh disetir oleh pasar. Dengan kata lain, pertimbangannya harus berat pada pendidikan itu sendiri, bukan tren pasar atau yang lain.

Walaupun begitu, satu sikap yang dibuat dalam menghadapi arus pasar yang cenderung memuja-muja TIK adalah dengan terus mempelajari, menguasai, mengimplementasikan dan mengkaji TIK dalam praksis pendidikan, bukan dengan mereduksi kajian dan praksis TP. Perkembangan terkini dari kajian ilmu pendidikan yang lintas-disiplin keilmuan seperti politik pendidikan, sosiologi pendidikan baru (*the new sociology of education*), munculnya media baru (teknologi digital, internet, dan lainnya) dan kajian kritis yang mengiringinya (*new media critical studies*) harus mendapat perhatian serius dalam mengkaji TIK

dan TP sendiri (Lister, *et al*, 2009; Apple, 2004; McLaren, 1995). Bahkan secara khusus, perlu dikembangkan ranah kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai TIK dalam TP. Antara lain mengkaji secara mendalam mengenai *new media*, *cybereducation* dan *mobile education* sampai pada ranah ideologi, dampak psiko-sosialnya, termasuk di antaranya *cyberculture* dan *cyber bullying* (lihat Januszewski & Molenda [eds.], 2008: 97-98; Somekh, 2007; Kowalski, *et al*, 2008).

Di samping itu, pada ranah yang lebih teknis, namun juga tentu tidak kalah penting adalah: perlunya mewacanakan dan memperjuangkan posisi-posisi kerja yang mestinya menjadi bidang garapan dari kajian dan praksis TP dalam pendidikan. Tentu dengan mendasarkan pada ideal TP, di antaranya adalah perlu diperjuangkan bahwa satu sekolah atau jurusan di perguruan tinggi memerlukan minimal satu ahli TP untuk mengkaji, membantu mendesain, memformulasikan dan mengevaluasi kurikulum, media pembelajaran, dan seting pembelajaran; juga merumuskan, mengelola pusat sumber belajar, baik berupa perpustakaan, laboratorium, galeri, sanggar seni, dan lainnya. Tidak hanya pada institusi pendidikan (sekolah, kampus, madrasah, dan lainnya), bahkan di Dinas Pendidikan pun selayaknya memiliki minimal satu ahli TP untuk keperluan peningkatan kualitas internal dan eksternal dalam satu sistem jaringan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah setempat.

Penutup

TIK sekarang memang sedang jadi tren termasuk dalam ranah kajian dan praksis TP, Mereka yang mendewa-dewakan internet dan jenis TIK lainnya dalam pendidikan seringklai lupa, bahwa terdapat kompleksitas dimensi dari implementasi media pembelajaran dan pendidikan termasuk TIK tentunya yang tidak dapat ditangani oleh hanya kemampuan teknis mengoperasikan TIK saja. Kemampuan “pedagogi” diremehkan dengan menganggapnya sekadar sebagai “cara mengajar” yang tiap orang pasti bisa melakukannya tanpa harus belajar secara akademik. Oleh karena itu, posisi yang harus dijelaskan adalah: (1) karena TIK bagian dari TP dan TP merupakan bagian dari ranah pendidikan, maka pedagogi sangat penting dalam kajian dan praksis TIK dalam TP; (2) seorang guru/dosen yang membelajarkan TIK pada siswa/mahasiswanya tidak sekadar memerlukan penguasaan teknis TIK belaka, lebih dari itu harus dilandasi oleh dasar pedagogi yang kuat.

Pada kenyataannya gerak langkah TP sebagai sebuah kajian dan praksis pendidikan di Indonesia masih belum kokoh, seperti: (1) minimnya formasi/posisi TP di sekolah dan Dinas Pendidikan; (2) masih lemahnya penelitian-penelitian yang mendasar dan betul-betul dapat membangun TP sebagai sebuah kajian dan praksis pendidikan; (3) belum dipahaminya TP secara utuh dan komprehensif bahkan oleh banyak dosen yang mengajar di jurusan TP sendiri. Setidaknya tiga

masalah inilah yang menjadi sebab “tergelincirnya” TP pada tataran konseptual dan praksis di jurusan-jurusan TP menjadi sekadar TIK. []

Daftar Pustaka

- Apple, Michael W. (2004). *Ideology and Curriculum*. 3rd Edition. New York & London: RoudedgeFalmer.
- Buchori, Mochtar. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Sinar Harapan dan IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Burton, John K., *et al.* (1996). "Behaviorism and Instructional Technology" dalam David H. Jonassen (ed.), *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*. New York: Simon & Schuster Macmillan.
- Darmaningtyas, *et al.* (2009). *Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Yashiba & Damar Press.
- de Vaney, Ann & Rebecca P. Butler. (1996). "Voices of The Founders: Early Discourses in Educational Technology" dalam David H. Jonassen (ed.), *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*. New York: Simon & Schuster Macmillan.
- Drajat. (2010). "Plagiarisme dan Kenaikan Pangkat." *Kompas*. Jakarta: 18 Februari.
- Freire, Paulo. (1970). *Pedagogy of the Opressed*. Terj. M.B. Ramos. New York: Continuum.
- Giroux, Henry A. (2005). *Border Crossing: Cultural Workers and Politics of Education*. 2nd Edition. New York & London: Routledge.
- Gramsci, Antonio. (1971). *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Translation. Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publisher.
- Januszewski, Alan & Michael Molenda. (2008). *Educational Technology: A Definition With Commentary*. New York & London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kowalski, Robin M., *et al.* (2008). *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*. Blackwell Publishing.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.

- Lister, Martin., et al. (2009). *New Media: A Critical Introduction*. 2nd Edition. London & New York: Routledge.
- McLaren, Peter. (1995). *Critical pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern era*. London & New York: Routledge.
- Miarso, Yusufhadi. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Semiawan, R. Conny. (2008). *Pendekatan Transdisiplinaritas Ilmu dalam Dunia Pendidikan*. Paper disampaikan dalam Kongres IPTPI di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Jakarta: 28 Agustus.
- Somekh, Bridget. (2007) *Pedagogy and Learning With ICT: Researching the Art of Innovation*. London & New York: Routledge.
- Surakhmad, Winarno. (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Torres, Carlos Alberto. (2009). *Education and Neoliberal Globalization*. New York & London: Routledge.
- Yuwono, Suwilan Wisnu Yuwono. (2005). *Peran dan Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Informasi*. Artikel disampaikan dalam Seminar Nasional “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI&K) dalam Pembelajaran Menuju Masyarakat Berbasis Informasi”. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Semarang: 17 September.

Referensi Media Massa

- Jawa Pos. (2009). “Pemeliharaan Alat Harus Jadi Budaya.” *Jawa Pos, Radar Yogja*. Surabaya: 30 November.
- Kompas. (2008). “Penggunaan Multimedia oleh Guru Tidak Bisa Ditunda.” *Kompas*. Jakarta: 23 Juli.
- Media Indonesia. (2009). “Kebiasaan Anak Nonton Televisi Harus Dikurangi.” *Media Indonesia*. Jakarta: 21 Februari.

- Republika. (2007). "Sekolah Tak Bisa Tangkal Situs Porno." *Republika*. Jakarta: 28 Desember.
- Republika. (2009). "Ada Kesenjangan Digital Antara Guru dan Murid." *Republika*. Jakarta: 6 November.
- Republika. (2009). "Cara Mudah Menjadi Plagiat." *Republika*. Jakarta: 11 Januari.

Referensi Internet

- Kurikulum. (2010). *Teknologi Pendidikan Unnes*. Diunduh pada 20 Maret 2010 dari <http://teknodik.unnes.ac.id/>.
- Program Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Siap Menerima Mahasiswa Baru 2010. (2009). *Teknik Elektro Unnes*. Diunduh pada 26 Maret 2010 dari <http://elektro.unnes.ac.id/>.
- S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. (2009). *Fakultas Teknik UNJ*. Diunduh pada 26 Maret 2010 dari <http://ft.unj.ac.id/teknik-elektro/s1-pendidikan-teknik-informatika-komputer/>.
- Sejarah Singkat. (2007). *Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*. Diunduh pada 20 Maret 2010 dari <http://kurtek.upi.edu/e-learning1/?page=sejarah.html>.